

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DINAS PU SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Gayung Kebonsari 169 Surabaya

DOKUMEN EVALUASI INTERNAL

Tahun 2019 Tribulan I

DAFTAR ISI

I.	PELAKSANAAN EVALUASI INTERNAL	3
	Hambatan dan Saran	3
II.	NOTULEN	4
III.	DAFTAR HADIR	5
V.	DOKUMENTASI	6

PELAKSANAAN EVALUASI INTERNAL

HAMBATAN

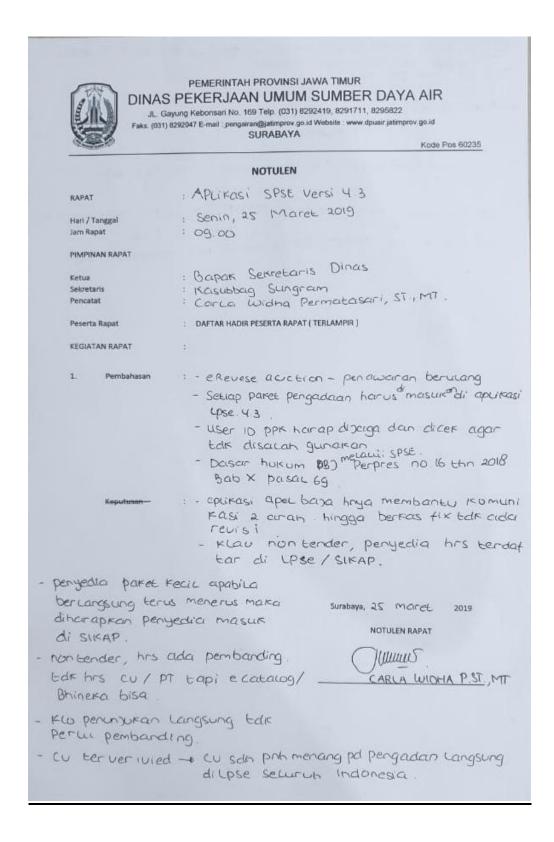
- 1. Diberlakukannya LPSE Versi 4.3.
- 2. Diberlakukannya kebijakan baru mengenai tugas PPK dalam LPSE.

SARAN

1. Harus ada sosialisasi kepada para PPK dan Pejabat Pengadaan mengenai penggunaan LPSE Versi 4.3.

NOTULEN

KEGIATAN RAPAT



DAFTAR HADIR

KEGIATAN RAPAT

400		SURABAYA		Kode Pos 60235
		DAFTAR HADIR PESERTA		Node Fos 00230
	0.	DAFTAK HADIK FEGERTA		
- 51	MATERI RAPAT :			
	HARI/TANGGAL Senin,	25 Maret 2019		
	TEMPAT RAPAT : R K en	nunma Lt 1)		
	PIMPINAN RAPAT : Sekreto	iris DPU SDA PROV	TATI	4
10	NAMA	JABATAN / INSTANSI	L/P	TANDA TANGAN
1	Edy Tamberg Widjaja	Sekretaris	L	1) 70
2	NOVITA ANDRIANIE	Meseurs . 8131	P	2)
3	+avzy	Kini PU PERA	- P	3) 704
4	PIAH ASRI	KASI O irigasi	0	4) ()(f)
5	BANUAK Inclaint	Kosie ppa sekretariat	P	5)
6	Fathha Hanifah Jeti Era S			7) CHANT
7	111	Stay Bid Inger	L	7)
8	Hery Brue (Kare PP UT Many	L	9) Au
9	ABOUL DAHNAN	PPTK UPT BONDOWOLD	_	10) 87.1
11	HERY KUSBIANTO	PP UP Bondowas	L	11) 5-1/100 6
12	Cuy tru	RPK UPT begins	L	N 124
13	Mun. Sunjani	PPK UPT. 120jonogoro	L	13) 76.
14	M. PURS W.	OPT. DEPO	L	14)
15	Agus Purgo J	torust Malang	レ	15) fully
16	NUNAKIO	upt madag	L	16)
17	Nur Wigants	Upt Kodiri	L	m Rung
18	Rachmad S	UPT FERNI	L	18)
19	TaufilB	UPT Byonge	L	19) De 1
20	Arra M.A.	UPT PASTLUON.	P	30)
21	NUT HASAN	7 7 7	1	21) 6-4
22	11995.3	BINPAT	L	22)
23	[1403] HP 29 1 1 2 3	UPT, Lumarany	L	23) [4]
24		OFT Suraboya	1	24)
25	Atial*	н	P	25 /14/2

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	L/P	TANDA TANGAN
26	On Porconer	PP PSDA B. GOT	(26) 26.0 10
27	Muryatin H	PP Bad PSDA	P	27) Alm
28	SUTTENO	Korune marin	l	28) 12/1
29	Carla Widha P	The state of the s		29) (1)
30	Febria A.			30)
31	GESTI PETNO W.	Star Suncean	P	31)
32	SUNARYADI W	SWP		32) Stuling
33	Suyono			\$ 53) / (N
34	M Fairus	sungton		345 1/109
35	Kisnanto	Jangjen	<	35)
36	Budhi yunita	Singram		36)
37	Brian	SUBLAM		37) MUX
38	Scierio	Sungram		38)
39	Dwi Andrigani	BITO AP		39)
40	Husen Sururi	BIFO AP		40) 和北…
41	Stimula Mingsin			1 41) 7928
42	SLAMET	SEKPETAPIAT		42)
43	- Sciento	Kevanzan	L	43) Q/M
44	Yoser A	4-	L	44
45	Ralman	Sencet-riat		45)
46				46)
47				47)
48				48)
49				49)
50				50)
51				51)
52				52)
53				53)
54				54)
55				55)
56				56)
57				57)
58				58)
59				ED
50				and a
51				041
52				61)
53				62)
34				64)

DOKUMENTASI

KEGIATAN RAPAT







PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR **DINAS PU SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TIMUR**

Jl. Gayung Kebonsari 169 Surabaya

DOKUMEN EVALUASI INTERNAL

Tahun 2019

Tribulan II

DAFTAR ISI

I.	PELAKSANAAN EVALUASI INTERNAL	3
	Hambatan dan Saran	3
II.	NOTULEN	4
III.	DAFTAR HADIR	5
V.	DOKUMENTASI	6

PELAKSANAAN EVALUASI INTERNAL

HAMBATAN

- Pengadaan Langsung dan tender fisik jaringan irigasi dilaksanakan setelah diselenggarakan pemilu tanggal 17 April 2019, sehingga terjadi keterlambatan progres fisik dan keuangan.
- 2. Keterlambatan pelaksanaan fisik gedung dikarenakan asistensi ke Cipta Karya membutuhkan waktu yang cukup lama.

SARAN

- Menyesuaikan pasal pasal pada SPK sesuai dengan Peraturan Presiden No 16
 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 2. Mempertegas pasal denda pada SPK.
- 3. Memperbarui SSUK SSKK.

NOTULEN

KEGIATAN RAPAT

DALAM RANGKA MENDUKUNG TERCAPAINYA TARGET KINERJA

NOTULEN

HARI/ TANGGAL : Senin, 24 Mei 2019

PUKUL

: 08.30 WIB

TEMPAT

: Ruang Rapat Rejoso Lantai III

ACARA

: Rapat Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun

2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PIMPINAN RAPAT : Kepala Dinas PU Sumber Daya Air

HADIR DALAM RAPAT:

1. Terlampir Dalam Daftar Hadir

HASIL RAPAT:

- 1. PP 58 tahun 2005 diganti PP NO 12 TH 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada point G dimana kewenangan PA menandatangani perjanjian dengan pihak lain. Dalam Perpres 16 Pasal 9 dan Permendagri no.13 juga menyatakan hal yang sama.
- 2. Definisi PPK yaitu pejabat yang diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan belanja daerah.
- 3. Dalam Perpres 16 Tahun 2018 menyatakan bahwa PA yg berhak melimpahkan penandatanganan perjanjian kepada KPA dan KPA berhak melimpahkan kewenangan dalam penandatanganan perjanjian kepada PPK. Akan tetapi walaupun PPK yang menandatangani perjanjian, kewenangan pembayaran tetep pada PA. PA bertanggung jawab terhadap perjanjian baik secara formil dan materiil.
- 4. Dalam kontrak perjanjian ada 2 pihak yang harus membubuhkan tanda tangan yaitu penyedia dan pejabat penandatangan kontrak (PPK/KPA/PA). Dalam tugas pokok PPK tidak ada penandatanganan kontrak. Dalam SK KPA juga tidak ada tugas penandatanganan kontrak.
- 5. PP No.12 Tahun 2019 mengatur tentang keuangan sedangkan Perpres 16 Tahun 2018 mengatur tentang pengadaan barang/jasa.
- 6. Perpres 16 Tahun 2018 mengatur perencanaan paket pekerjaan hingga serah terima barang/jasa paket pekerjaan tetapi tidak mengatur pembayaran paket pekerjaan.

- PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tugas PPTK menurut Perpres 16 Tahun 2018 yaitu
 - a. mengendalikan pelaksanaan Kegiatan.
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan.
 - c. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan dan kalau ada keterlambatan kegiatan yang diminta pertanggung jawaban adalah PPTK.
- 8. PPTK bertanggung jawab secara kualitas material dari pengadaan barang/jasa. PPTK secara hirarki jabatan terletak dibawah PA dan bertugas membantu tugas PA. Arti membantu tugas disini adalah tugas yang ditentukan oleh PA/KPA dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja yang melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
- Ketentuan lampiran kontrak diatur oleh Permendagri no.13 Tahun 2016. Ada Dalam waktu dekat Permendagri No.13 Tahun 2016 akan direvisi.
- 10. Kegiatan memiliki definisi yang sama dalam PP No.12 Tahun 2019 dan Permendagri No.13 Tahun 2006 dimana Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya balk yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
- 11. PPTK bertugas untuk melaksanakan kegiatan dimana contoh apabila diadakan sosialisasi maka yang mengendalikan kegiatan itu merupakan tugas dan tanggung jawab PPTK. Apabila dalam sosialisasi ada pengadaan mamin dan cetakan maka PPTK minta ke KPA kalau ada pengadaan maka KPA menugaskan ke PPK untuk mengadakan pengadaan barang untuk kegiatan sosialisasi.
- 12. Kelemahan dalam pengadaan barang/ jasa di Lingkungan Provinsi Jawa Timur adalah tidak ada ketetapan secara pasti masa pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Hal ini dilihat dari paket pengadaan pada Aplikasi SIRUP, banyak paket pekerjaan disana yang mengalami keterlambatan dari rencana pengadaan barang/ jasa. Kelemahan yang lain adalah belum sinkronnya laporan Keuangan dan pengadaan

barang dan jasa. KPK meminta semua pengadaan barang/ jasa harus sinkron dengan input pada Aplikasi Sirup.

- 13. Apabila ada keterlambatan pengadaan barang/jasa maka PPTK mempunyai kewenangan untuk mengendalikan keterlambatan tersebut. Dinas PU SDA ada 26 paket terlambat.
- 14. PPHP mempunyai tugas secara administrasi yaitu memastikan nilai DPA, SK, sudah terdaftar dalam Aplikasi Sirup proses pengadaan, Kontrak Perjanjian dan HPS. Semua itu dilakukan PPHP untuk membantu tugas PPK.
- 15. Tim teknis memberi masukan kepada PPK bahwa masa pelaksanaan kegiatan. Apabila ada panitia PPHP yg tidak setuju maka harus ditulis alasan ketidak setujuannya. Apabila 2/3 dari PPHP uda menyetujui dan tanda tangan maka kegiatan dapat diproses.
- 16. Apabila pekerjaan yang sedang di serah terimakan tidak sama dengan kontrak maka BAST tidak bisa ditandatangani tetapi laporan BPP tetap dapat ditanda tangani sebagai berita acara pemeriksaan. Kalau pekrejaan sama dgn kotrak maka BAST dapat ditandatangani. kegiatan layak atau tidak layak untuk dilaksanakan.
- 17. Berita acara harus memuat semua kejadian yang terjadi selama
- 18. Perbedaan Tim ahli dan tim teknis adalah

Tim ahli yaitu

Tim ahli dipilih oleh PPKOM. Tim ahli bisa berkontrak secara perorangan dan bisa dari instansi. Tim ahli yang digunakan bisa dari luar dan harus memiliki ada sertivikasi.

Tim teknis yaitu

Dipilih oleh PA dimana tim ini diketuai oleh PPTK. Tim teknis adalah orang yg dianggap mampu mengerjakan pekerjakan dari perencanaan hingga serah terima pekerjaan. Tim teknis digunakan sesuai dengan keahliannya dan kebutuhannya.

 Penyedia yg dapat menjalin kerjasama adalah penyedia yg terdaftar pada Aplikasi Sikap.

- 20. Semua pengadaan apabila proses pengadaan barang /jasa sudah dilaksanakan dan bukti pembayaran sudah ada maka harus dimasukan pada aplikasi SPSE versi 4.3 dengan metode pencatatan non tender.
- 21. Untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi maka pada aplikasi SPSE versi 4.3 harus tercatat pada metode non tender. Hal ini disebabkan bukti pekerjaan tersebut berupa SPK.
- 22. Ketika HPS tidak pasti dan bisa dinego maka harus melalui tahap pengadaan langsung dengan menggunakan metode non tender pada aplikasi SPSE. Bukti pengadaan ini dapat berupa kuitansi.
- Untuk metode non tender pada aplikasi SPSE penyedia yang dapat mengikuti bisa berjumlah 1 penyedia atau lebih.
- 24. Perpres 16 Tahun 2018 pasal 78 84 apabila penyedia yang melaksanakan pekerjaan tidak sama antara kontrak dengan pelaksanaan maka penyedia wajib menanggung ganti rugi Negara walaupun sudah ada BAST tapi penyedia harus tetap menanggung. Penyedia wajib tanggung jawab terhadap kualitas dan kuantitas. Apabila point diatas belum ada di SSUK, SSKK dan rancangan kontrak maka klausul ini harus dimasukan dalam kontrak perjanjian.
- 25. Pengadaan barang dan jasa yg dikecualikan yaitu akomodasi, konsumsi, Hotel, listrik, PDAM, air dan BBM.

Surabaya 24 Mei 2019

EDY TAMBENG WIDJAJA, ST., M.Si

DAFTAR HADIR

KEGIATAN RAPAT

DALAM RANGKA MENDUKUNG TERCAPAINYA TARGET KINERJA



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR

Jl. Gayung Kebonsari No.169 Tetp.(031) 8292419, 8292234, 8291711, 8295822
Faks.(031) 8292047 E-mail: pengairan@jatimprov.go.id Website: www.dpuairjatim.com
SURABAYA

Kode Pos 60235

DAFTAR HADIR PESERTA

MATERI RAPAT	: Rapat Sosialisasi Peraturan Presiden
	Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang 100
HARI/TANGGAL	Hemerinean Jumae, 24 Mei 2019
TEMPAT RAPAT	: Ruang Rapat Resource Lt. III
PIMPINAN RAPAT	: Kepala Dinas PU Sumber Daya Air.

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	L/P	TANDA TANGAN
1	M. Abany prun	Kans Puspy	V	1) /
2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			2)
3	R. cools P.H	Ke UPT ROAWS RUP!	Eparter	3) Jan 1
4	606UN. S	la up tear us prute		4)
5	Muhammad Sunjani	Up. PIVA US BENGONACIO		5) 7 1
6	M. Haveyanco	Kq.UDT. B.Weso		6)
7	AW. Knutionho	upt B. Bund		7)
8	Digh asn .s .	Trigasi		8) 1
9	Favzy N	PSPA-		Hany.
10	Taufik B.	uri Byos.		10) /
11	PRABOWO	Kasi P UPT Perurua	`	11 hay
12	Aswin. Praselyanto	UPTEDA Bajonegoro		12)
13	S. TEGUH	BIRO ADM-Paul	0	13)
14	febria A	Sungram		160
15	Jeti Era s	Ingon		15)
16	Fatkha Hanifch	seleretoriat		16)
17	SUBANDI	UPS MADONA		17/01/10/
18	EUTRISNO.	OLI BERY BOLOLON.		18)
19	Pipit settowan	. 11		19)
20	Foregis.	Kowd Maloy		(20)
21	Soy 400	Komo 1 Malay		21)
22	Nur Wiganto	UPT Brantons ford A		22) Albert
23	Susi Dwi Artuti	UPT PSDA BOJONEGOTO		23) [15]
24	MANHAD JUDGA	orogonog . Tan		24)
25	IPMA PACHMANAT	eidlang Amfat		25)(

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	L/P	TANDA TANGAN
26	Diolo Wahions	teautr lunging	1	26)
27	Hery Brid Soldhum	Kano upr ling	L	27 has
28	Bambary Durwono 4.	Ящ ирт. нимирых	1-	28) Topic-
29	Annas W	PSDA	L	29)
30	Dian Dwi Ernawah	Korwil Malang		30)
31	SITI NASI'AA	UPT TUAL.	P	3/17/12
32	Esty	Yasuru an	6	33
33	Witz "	Sungram	·P	1
34	Promono Horz	Birty higy / PSDA	-	34)
35	Promono Haz	Brid. Bridget.		35)
36	Gosti Petro	Sungram	P	36)
37	Muryatin M	PSDA	P	37)
38	6191- 540 ×	PPK OFT Maave	0	39) ()
39	Carla W.P.	Sungram	P	-
40				41)
41				
42				43)
43			_	
44				45)
45				46)
46				47)
47				48)
48				49)
49				50)- •
50				51)
51				52)
52				53)
53				54)
54				55)
55				56)
56				57)
57				58)
58				59)
59				60)
60				61)
61				62)
62				63)
63				64)
64				64)

DOKUMENTASI

KEGIATAN RAPAT





